

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Penganggaran Dana Desa Terkait Dengan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dengan menggunakan model analisis SWOT untuk mengidentifikasi suatu permasalahan untuk mencapai solusi dengan mengklasifikasikan berdasarkan 4 (empat) elemen: Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*).

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dengan menggunakan 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Kalibagor. Penentuan subyek penelitian berdasarkan tingkatan serapan dana dari yang tinggi, sedang dan rendah. Kemudian terpilih 8 (delapan) desa tersebut untuk dijadikan subyek penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami lebih mendalam mengenai Penganggaran Dana Desa terkait dengan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan mengidentifikasi setiap hambatan-hambatan dan memberikan solusi atas data yang diperoleh dari informan yang terpilih.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran dana desa terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa yang ada di Kecamatan Kalibagor, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pertanggungjawaban masih belum dilakukan secara maksimal, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi baik dari internal maupun dari eksternal yang diklasifikasikan menggunakan model analisis SWOT yang diperoleh hasil seperti koordinasi yang kurang baik dalam sistem pemerintah desa. Kemudian regulasi yang selalu berubah-ubah menyulitkan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa karena rendahnya pemahaman pemerintah desa terkait dengan regulasi tentang pengelolaan anggaran Dana Desa. Akan tetapi dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperbaiki sistem koordinasi pada pemerintahan desa dapat memudahkan dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dilaksanakan dengan swakelola, dengan bekerja sama dengan pihak ke 3 sebagai pendukung kegiatan swakelola. Serta pemanfaatan akses informasi dan komunikasi untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan baik pembangunan maupun pemberdayaan sehingga desa dapat melaksanakan tugas dengan baik, dari hasil kegiatan tersebut akan berdampak kepada tingkat penyerapan dana semaksimal mungkin untuk memperoleh anggaran dana yang dialokasikan pemerintah guna meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa.

**Kata Kunci:** Sistem Penganggaran Dana Desa, Pengadaan Barang dan Jasa, Analisis SWOT

## SUMMARY

*This research aims to determine how the Village Fund Budgeting System Related to Goods and Services Procurement Activities in Kalibago District, Banyumas Regency by using a SWOT analysis model to identify a problem to reach a solution by classifying based on 4 (four) elements: Strengths, Weaknesses Weaknesses, Opportunities, and Threats.*

*The research was conducted in Kalibago District, Banyumas Regency using 8 (eight) villages in Kalibago District. Determination of research subjects based on the level of absorption of funds from high, medium and low. Then 8 (eight) villages were selected to be the subject of research. The method used in this study uses qualitative analysis methods to explore and understand more deeply about Village Fund Budgeting related to Goods and Services Procurement Activities, by identifying each obstacle and providing solutions to data obtained from selected informants.*

*The results of this study indicate that the village budgeting system associated with the procurement of goods and services in the village in Kalibago District, starting from the stages of planning, implementation, supervision to accountability has not been carried out to the fullest, based on the results of the research conducted found several factors that influence both internal and external were classified using the SWOT analysis model which results in poor coordination in the village government system. Then the ever-changing regulations make it difficult for the village government to carry out the procurement of goods and services due to the low understanding of the village government related to regulations on village fund management. However, by increasing the quality of Human Resources (HR) to improve the coordination system in the village government, it can facilitate the procurement of goods and services in accordance with applicable regulations, namely carried out by self-management, by working with third parties to support self-management activities. As well as the use of access to information and communication to facilitate the implementation of both development and empowerment activities so that villages can carry out their duties properly, the results of these activities will have an impact on the level of absorption of funds as much as possible to obtain the budget allocated by the government to improve village development and economy.*

**Keywords:** *Village Fund Budgeting System, Procurement of Goods and Services, SWOT Analysis*